



RENCANA KERJA

(RENJA)

PERUBAHAN

2025



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN**

KABUPATEN TABALONG

KATA PENGANTAR

Perencanaan Kerja Perangkat Daerah, merupakan salah satu instrumen untuk membantu memahami keseluruhan gambaran tugas organisasi secara lebih jelas, lebih rinci dan meminimalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Disusunnya perencanaan kerja juga akan memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian/unit kerja SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan salah satu bagian dari siklus perencanaan daerah. Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta mengacu pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Dokumen Renja Perubahan memuat program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2025 disertai pagu dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

Renja Perubahan sebagai road map tahunan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mengawal konsistensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD yang pada gilirannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tabalong,



H. SYAFARI, SP, MP

NIP. 19750504 200003 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun 2025 Serta Capaian Renstra Tahun 2019-2024	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	20
2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi	43
3.2 Tujuan dan Sasaran	44
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	56
BAB V PENUTUP	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan SKPD sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Acuan Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matrik yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumberdana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
 - 6). Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- 1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- 2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2 Tujuan

- 1) Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA Perubahan Tahun 2025;
- 2) Memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025;
- 3) Memberikan alternatif pemecahan permasalahan.
- 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi

dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025 serta Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisi uraian tentang :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- c. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.

Diskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025.

3.2 Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel (lampiran) dengan penjelasan mengenai uraian garis besar program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Nama program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya.
- b. Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut penggunaannya.

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V.PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencanatindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Perkiraan Tahun 2025 Serta Capaian Renstra Tahun 2019-2024

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil Tahun 2024.

Untuk tahun 2021 dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, maka Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Permendagri tersebut.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2024 (tahun berjalan)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2022 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun berjalan	
						Target Renja Tahun 2023 (n-1)	Realisasi Renja tahun 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =(8/7)	1	2	3
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Persen	67,16		59%	59%	100	67,16		
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	KSP / USP	20		20 KSP/ USP	16 KSP/ USP	80	20		
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	Persen	40		60 orang	60 orang	100	40		

	PERKOPERASIAN										
	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitas Kemitraan Usaha	Persen	100		100	100	100	100		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	Persen	100		100	100	100	100		
	Urusan Perdagangan										
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	Persen	85,15		84,17 %	84,17%	100	85,15		
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Persen	88		85%	85%	100%	88		
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,21		9,21%	*) Menunggu data dari BPS		9,21		
		Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	Persen	1,10		1,26	*) Menunggu data dari BPS		1,10		
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	Persen	60		62,5%	60%	96	60		

	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	Persen	69		70%	70%	100	60		
	Urusan Perindustrian										
	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,51		11,37 %	*) Menunggu data dari BPS	11,51			
		Pertambahan industri baru	unit usaha baru	40		35 unit usaha baru	35 unit usaha baru	100	40		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	Persen	70		60%	60%	100	70		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	Persen	100		100%	100%	100	100		

Tabel 2.2
Capaian Target Indikator Kinerja dan Penyerapan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target dan Capaian						Realisasi Penyerapan
		Target 2023	Capaian Kinerja	Prosentase Kinerja (%)	Progam	Kegiatan sesuai Renstra / Perjanjian Kerja	Anggaran	Anggaran 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Koperasi dan UMKM								
1	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	60 Unit Koperasi	100 %	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 82.756.014	Rp 74.499.573
2	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Unit Usaha	16 Unit Usaha	100%	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 53.218.181	Rp 45.246.169
3	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	60 Orang	60 Orang	100 %	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 144.270.250	Rp 140.587.300

	Kompetensi SDM KoperasiKoperasi							
4	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro dan Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	50 Unit Usaha dan 60 Unit Usaha	50 Unit Usaha dan 60 Unit Usaha	100%	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp 542.927.314	Rp 379.795.005
5	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	100%	PENGEMBANGAN UMKM	Keg. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp 1.705.991.613	Rp1.646.735.550
Urusan Perdagangan								
1	Jumlah rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang dikeluarkan	2 izin usaha	2 izin usaha	100,00%	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp 13.170.000	Rp 5.117.000
2	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Gudang yang dikeluarkan	8 izin usaha	1 izin usaha	12,5%		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Rp 15.755.000	Rp 1.200.000

3	Jumlah rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol yang dikeluarkan	1 izin usaha	1 izin usaha	100,00%		Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Rp 18.402.000	Rp 8.553.000
4	Jumlah laporan ketersediaan Bapokting dan Jumlah laporan kelancaran aksesibilitas Bapokting	12 bulan	12 bulan	100%	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 97.183.000	Rp 45.573.116
5	Laporan harga stok ditingkat distributor (Bulan)	12 bulan	12 bulan	100%		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp 2.026.484.240	Rp 506.632.068
6	Promosi Luar daerah Kabupaten (Kali)	1 Kali	0 Kali	0,00%	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 42.307.000	Rp 9.735.722

7	Jumlah kriteria pengelolaan pasar yang memenuhi SNI	11 Kriteria SNI	11 Kriteria SNI	100%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Rp 1.155.087.500	Rp 1.002.804.628
8	Jumlah kriteria untuk sarana pasar yang memenuhi SNI	30 Kriteria SNI	30 Kriteria SNI	100%		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 33.412.743.167	Rp 26.068.314.996
9	Jumlah alat UTTP pasar dan SPBU yang dtera/tera ulang	1717 UTTP	1717 UTTP	100%	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rp 902.120.520	Rp 592.711.420
Urusan Perindustrian								
1	Jumlah industri baru	35 WUB	45 WUB	100%	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp 1.884.842.021	Rp 1.516.257.711

2	Jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi	33 Ijin	33 Ijin	100%	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan usaha Industri (IPUI),Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 18.098.000	Rp -
3	Tersedianya data industri per semester dan 1 buku laporan informasi industri	1 Lap/Buku	1 Lap/Buku	100,00%	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 32.722.000	Rp 19.677.456
Sekretariat								
1	Tersusunnya laporan kinerja LKPJ, LPPD, SAKIP	100%	100,00%	100,00%	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 138.939.452	Rp 114.889.648
2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100,00%	100,00%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 994.687.361	Rp 942.111.332

3	Terlaksananya operasional jasa surat menyurat, Terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik	100%	100,00%	100,00%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 1.641.273.578	Rp 1.346.725.479
4	Terpeliharanya barang milik daerah (Persen)	100%	100,00%	100,00%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.066.324.625	Rp 951.754.391
5	Terbayarnya gaji pegawai (bulan)	12 bulan	12 bulan	100,00%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 11.112.507.070	Rp 9.683.913.063

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong adalah :

- A. Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- B. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- C. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- D. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- E. Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan serta Perjanjian Kinerja dan Hasil Rakortek adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	59 %
2	Meningkatnya Kewirausahaan	Pertumbuhan Usaha Mikro	0,28 %
3	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Prosentase kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9.21 %
4	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Prosentase kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11.33 %

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala – kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja atas sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n 1)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n -1)	Tahun 2024 (n 1)	Tahun 2025 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
1	Pertumbuhan UMK				0,25	0,26	0,27			0,27	0,28	
2	Jumlah Koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai				80	80	80		59	60	61	
3	Jumlah Anggota Koperasi yang dilatih				360	360	360		272	275	300	
4	Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Usaha Koperasi				3	3	3	3	3	3	3	
5	Terlaksananya pembinaan usaha mikro menjadi usaha kecil				30	30	30	30	30	30	30	

6	Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih Wirausaha				90	90	90	90	90	90	90	
3.4 Perdagangan												
7	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB				9,21	9,21	9,21	8,95	9,21	9,21	9,21	
8	Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting				1,42	1,27	1,14	1,58	1,42	1,27	1,14	
9	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang Dikeluarkan				82	85	86	70	82	85	86	
10	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015				59,97	84,17	100	47,38	59,97	84,17	100	
11	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor				50	62,5	75	35	50	62,5	75	
12	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang				60	70	80	56	60	70	80	

3.5 Perindustrian												
13	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB				11,23	11,37	11,51	8,89	5,91	11,37	11,51	
14	Pertambahan Industri Baru				33	35	37	40	35	35	37	
15	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik				54	60	66	46	60	60	66	
16	Tersedianya Informasi Industri				100	100	100	100	100	100	100	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok- Pokok Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 terdapat 5 (lima) isu strategis yakni :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
Permasalahan dan isu strategis Pertumbuhan ekonomi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya usaha dan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan wilayah;
 - b. Belum optimalnya produksi dan mutu hasil pertanian dan perikanan untuk mendukung agrowisata;
 - c. Masih rendahnya keterampilan calon tenaga kerja, jumlah dan kelas Wira Usaha Baru (WUB), serta peran UMKM.
 - d. Belum optimalnya transformasi struktur ekonomi untuk pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
Permasalahan mengenai Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Tabalong diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kualitas penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing masih belum optimal;
 - b. Masih rendahnya produktivitas dan daya saing angkatan kerja;
 - c. Pelaksanaan wajib belajar 2 tahun PAUD dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah belum terwujud.
 - d. Masih kurangnya keahlian dan keterampilan calon tenaga kerja dan Wira Usaha Baru.
 - e. Prevalensi stunting masih dinilai cukup tinggi.
 - f. Masih terdapat Penyakit menular (DBD, Malaria, TBC).
 - g. Masih tingginya penyakit tidak menular (stroke, jantung, diabetes).

3. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur.
Permasalahan Infrastruktur dasar/Wilayah dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Kualitas pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian wilayah terutama di daerah terpencil dan perbatasan belum merata.
 - b. Kesiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penataan kota dan lingkungan permukiman belum optimal.
 - c. Infrastruktur penyediaan air minum dan sanitasi masih belum menjangkau ke seluruh daerah secara merata.
 - d. Penyediaan sistem tata pengairan untuk mendukung pertanian masih kurang.

4. Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah yang berorientasi pada Pelayanan Publik.
Permasalahan kinerja di Kabupaten Tabalong diuraikan sebagai berikut :
 - a. Kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.
 - b. Belum optimalnya efektifitas tata kelola pemerintahan.
5. Pembangunan yang berwawasan Lingkungan dan Berketahanan Bencana.
Terkait dengan persoalan peningkatan tata kelola lingkungan di Kabupaten Tabalong, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup, dan penanganan persampahan.
 - b. Kesiapan sumber daya penanggulangan darurat dan mitigasi bencana belum optimal.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, hal-hal kritis yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terutama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya yang langsung melayani masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain adalah:

1. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif.
2. Masih banyaknya koperasi aktif yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
3. Belum berkembangnya usaha koperasi.
4. Belum optimalnya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah menyebabkan tingkat pertumbuhan UKM rendah.
5. Belum memadainya prasarana dan sarana perdagangan
6. Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar
7. Belum efektifnya pembinaan distribusi lokal, tertib niaga, dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan lokal yang kondusif dan dinamis
8. Masih rendahnya akses pasar bagi hasil industri lokal
9. Rendahnya daya saing produk IKM
10. Belum optimalnya pengembangan industri kecil menengah yang berbasis potensi lokal

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain adalah:

1. Sumber daya manusia sektor industri dan perdagangan masih rendah.
Pengembangkan usaha di masyarakat sangat tinggi, sementara sumber daya manusia di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki keahlian untuk memberikan pelatihan dan/atau pendampingan usaha sangat terbatas.
2. Jumlah pedagang pasar tradisional relatif banyak. Dengan jumlah pedagang yang relatif banyak menimbulkan tantangan untuk

dapat mengimbangi pelayanan terutama terkait dengan penyediaan tempat dasaran bagi pedagang.

3. Lembaga-lembaga pelatihan dan permodalan yang mendukung pengembangan pelaku usaha relatif banyak. Adanya lembaga-lembaga pelatihan dan permodalan yang mendukung pengembangan usaha memunculkan peluang kerjasama bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat pelaku usaha.

Dari berbagai hal tersebut di atas, diantara beberapa isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan beberapa pokok permasalahan antara lain :

1. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UKM agar memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan
3. Pengembangan sentra industri
4. Memperkuat daya saing produk IKM
5. Tenaga kerja yang andal, terampil dan terlatih
6. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi
Kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ekonomi dilaksanakan dengan program "Penataan dan modernisasi pasar-pasar mingguan "
7. Optimalisasi peningkatan PAD

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Terkait Arah dan Kebijakan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ada beberapa rancangan program prioritas pada RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menitikberatkan pada isu aktual seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, daya saing daerah, tatakelola pemerintahan/reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pemenuhan infrastruktur dasar mendukung IKN dan tatakelola lingkungan hidup.

Sasaran pokok strategis tahun 2025, diantaranya meliputi; Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Meningkatnya kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting dalam rangka pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN, Meningkatnya kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal dan Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Prioritas Kabupaten/Kota terhadap RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain :

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN.
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal.
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Reviu terhadap rancangan awal RKPD 2025 terhadap Analisa kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Program dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan

No	Program / Kegiatan		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Catatan
			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Bidang Koperasi											
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	63 Unit Usaha	84.630.700		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	63 Unit Usaha	84.630.700	
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (Pemeriksaan Kesehatan)		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	201.400.000		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	16 Unit Usaha	201.400.000	
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN		Kab.				Kab.				

	LATIHAN PERKOPERASIAN		Tabalong				Tabalong				
		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	172.718.400		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 orang	172.718.400	
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil											
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	200.000.000		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	200.000.000	
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	200.000.000		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	30 Unit Usaha	200.000.000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	500.000.000		Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	200 Unit Usaha	500.000.000	

		Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	850.000.000		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	300 Unit Usaha	850.000.000	
Bidang Industri											
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	228.541.197		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	228.541.197	
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.300.348.897		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.300.348.897	
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	4.498.822		Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	4.498.822	
--	--	---	--	--	--------------	-----------	--	--	--------------	-----------	--

		Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	24.864.578		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	24.864.578	
--	--	--	--	---	----------------------	-------------------	--	---	----------------------	-------------------	--

8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melauai Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	29.168.700		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	29.168.700	
Bidang Perdagangan dan Kemetrolgian											
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar	4 Dokumen	28.600.000		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar	4 Dokumen	28.600.000	

		Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
		Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	24.200.000		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	24.200.000	
		Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	22.000.000		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	22.000.000	
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Koordinasi		Jumlah Laporan Koordinasi	2 Laporan	8.604.300		Jumlah Laporan	2 Laporan	8.604.300	

	dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	62.500.000		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan	62.500.000	
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	192 Laporan	61.000.000		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	192 Laporan	61.000.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	260.000.000		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	260.000.000	

		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	125.000.000		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	125.000.000	
		Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	33.000.000		Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan	33.000.000	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Kab. Tabalong			113.203.970	Kab. Tabalong			113.203.970	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota									
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				

		Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25 Unit	330.000.000		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	25 Unit	330.000.000	
		Sub Kegiatan Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 Unit	61.000.000		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	25 Unit	61.000.000	
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perdagangan											
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Kab. Tabalong				Kab. Tabalong				
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	19.061.108.217		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	19.061.108.217	
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1.115.530.254		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1.115.530.254	
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	37.500.000		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	37.500.000	
Sekretariat											

14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Kab. Tabalong			Kab. Tabalong					
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Laporan		89.816.932	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Laporan	89.816.932	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		41.514.763	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	41.514.763	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		86.648.000	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	86.648.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang / Bulan		12.104.478.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang / Bulan	12.104.478.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		436.269.705	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	436.269.705	
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		506.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	506.000.000	

		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		307.873.665		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		307.873.665	
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	770.000.000		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	770.000.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	308.809.340		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	308.809.340	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	351.600.000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	351.600.000	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	101.796.065		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	101.796.065	
		Sub Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	764.935.200		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	764.935.200	

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41 Unit	675.320.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41 Unit	675.320.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	203.413.665		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	203.413.665	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tabalong membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang akan ditindak lanjuti oleh SKPD terkait melalui mekanisme musrembang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan berjenjang dari level terbawah sampai dengan tingkat kabupaten.

Setelah proses usulan tersebut masuk ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, maka dilakukan penyaringan atau seleksi kegiatan yang mendukung prioritas Kabupaten. Dengan terseleksinya kegiatan tersebut diharapkan adanya efisiensi terhadap biaya dan sumber daya lainnya sehingga pencapaian target kinerja lebih mudah terlaksana.

Seleksi kegiatan tersebut dilakukan melalui Kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Aula Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rekap Usulan Forum Perangkat Daerah
tahun 2024 untuk Rencana Kerja 2025

1. Kecamatan Tanjung ada 3 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Yurdani Aklam, S.Pd,MA	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Belum adanya tempat pasar karet yang representatif. Adapun lahan / lokasi pasar karet yang digunakan saat ini di sewa oleh pembeli karet. Ukuran 50 M x 75 M	Jalan Pelita RT 07 , Kab. Tabalong	Menunggu Proposal ukuran 50 x 75 meter, dianggarkan tahun berikutnya
2	Mahyudin	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	lat produksi untuk kelompok UMKM tersebut. Berupa : 1. mixer besar dan hand mixer 2. oven besar 3. kompor gas satu set 4. alat penggiling mie 5 alat akar pinang 5. alat mempres minyak 6.toples besar untuk penyimpanan	desa garunggun, Kab. Tabalong	Menunggu Proposal, akomodir 2025

3	Muhammad Jahyani, S.AP	eningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Penataan Ulang Pasar Jangkung RT.005	Jl. Jend. A. Yani RT.005, Kab. Tabalong	Luas Terbatas, Kendala Akses Masuk, untuk perencanaan akan di akomodir di anggaran perubahan 2025
---	------------------------	---	--------------------------------------	---	---

2. Kecamatan Haruai ada 7 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Herman Susilo	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Fasilitas pasar kurang memadai (pasar tradisonal)	Ribang 2 RT 13 Desa Hayup, Kab. Tabalong	Bukan Aset Diskopukmperindag (Non Prioritas)
2	Hendrikus Lada	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	cara pengemasan produk usaha kecil belum ada	desa suryan, Kab. Tabalong	Menunggu Produk yang akan Fasilitasi Sertifikasi Halal, Pelatihan Kemasan (Akomodir dengan syarat proposal)
3	Dwi Adi Saputra	Penyediaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Desa Wisata identik dengan kuliner maupun oleh oleh khas daerah Wisata tersebut, sehingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat Desa Catur Karya seiring dengan pembangunan Desa Wisata Desa Catur Karya maka perlu adanya pelatihan Tata Boga	Desa Catur Karya RT 01 s/d 05, Kab. Tabalong	Usul Pelatihan Pengolahan Souvenir dari karet, Produk Jamu untuk Fasilitasi Halal (Akomodir menunggu proposal)
4	Sahrian	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Pembangunan Sarana Usaha Pencucian Kendaraan Milik Karang Taruna	Kembang Kuning RT 001, Kab. Tabalong	Crosscutting BLK (Tidak Diakomodir)
5	Muhammad Yusuf	Penyediaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kurangnya produktifitas kelompok anak muda dalam Bidang Peracik Minuman Kopi (Barista)	Suput, Kab. Tabalong	Akomodir menunggu proposal

6	H. Zainal Firdaus	Pembukaan Lapangan Kerja/ Kesempatan Kerja	Pembukaan/Kesempatan kerja tentang barista/peracik minuman kopi	Desa Halong RT.002, Kab. Tabalong	Akomodir menunggu proposal
7	Dwi Adi Saputra	Pembukaan Lapangan Kerja/ Kesempatan Kerja	Perlu diadakannya peracik minuman kopi (Barista)	Desa Catur Karya RT 01 s/d RT 05, Kab. Tabalong	Akomodir menunggu proposal

3. Kecamatan Kelua ada 7 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Yulnarian	Pengendalian Harga dan Stok Barang Penting	Harga sembako sering naik dan hal ini perlu di adakannya pasar murah sembako di Kantor Desa Sungai Buluh	Desa Sungai Buluh , Kab. Tabalong	usulan berulang (tolak)
2	M. Akhyar	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Setiap kegiatan acara perkawinan kegiatan memarut kelapa dilakukan secara manual oleh ibu-ibu di desa. Memarut kelapa secara manual ini memakan waktu yang lama dan menggunakan tenaga yang banyak. Sehingga ibu-ibu di desa memohon bantuan mesin parut kelapa agar kegiatan memarut kelapa saat acara perkawinan bisa lebih efektif dan efisien (Permohonan bantuan pengadaan mesin parut kelapa)	Desa Paliat RT 01, 02, 03 dan 04, Kab. Tabalong	akomodir 2024 (pokir)
3	M. Akhyar	Penyediaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Masih banyak pemuda/pemudi yang lulusan sekolah atau kuliah belum mendapatkan pekerjaan (belum bekerja) sehingga perlu dibekali berbagai pelatihan/skill sehingga mampu menciptakan lapangan kerja sendiri (Pelatihan membatik)	Desa Paliat RT 01, 02, 03 dan 04, Kab. Tabalong	Menunggu Proposal , akomodir 2024
4	Mawardi	Pengembangan Usaha Mikro/	Untuk meningkatkan kualitas dari UMKM di	Desa Masintan,	Pembuatan Cendol,

		Usaha Kecil	desa Masintan maka perlu adanya sosialisasi/pelatihan/bantuan untuk pelaku usaha	Kab. Tabalong	menunggu proposal (Akomodir)
5	Rustam	Penyediaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	SDM Warga Binturu jumlah penduduk yang banyak, tapi perlu keterampilan-keterampilan khusus seperti kerajinan membuat alat-alat rumah tangga atau menangkap ikan dari hasil SDA yang ada di Binturu seperti bambu/paring/haur.	Binturu RT.02, Kab. Tabalong	Akomodir 2024
6	Muhammad Haris	Pemasaran hasil produksi Pertanian	Kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian	Telaga Itar RT. 001, Kab. Tabalong	Subsidi , program julakwasi (akomodir 2025)
7	Yulnarian	Pengendalian Harga dan Stok Barang Penting	Harga sembako sering naik dan hal ini perlu diadakannya pasar murah sembako di Kantor Desa Sungai Buluh	Desa Sungai Buluh , Kab. Tabalong	akomodir 2025

4. Kecamatan Banua Lawas ada 1 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Agus Wari	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Pedagang berjualan di pinggir jalan sehingga mengganggu lalu lintas pengguna jalan dan kondisi bangunan kantin Yang Kecil dan Tanah Pasar Pasar bisa dilakukan siring beton Dan Peninggian P = 25 M	Sei Durian RT. 01, Kab. Tabalong	Akomodir perubahan 2024

5. Kecamatan Bintang Ara ada 2 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Diki Asdie	Pemasaran hasil produksi Pertanian	tidak ada tempat pemasaran hasil pertanian yang tetap	Desa Dambung Raya RT 01 sampai dengan RT 06, Kab. Tabalong	Pasar Agrobisnis sebagai pusat pemasaran hasil pertanian
2	Bahrudin	Pemberdayaan Koperasi dan Anggota	minimnya pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu dalam hal pembuatan	Desa Usih, Kab.	Menunggu Proposal untuk Diakomodir di

		Koperasi	berbagai kue dan bumbu yang dapat menunjang usaha sampingan keluarga sehingga diadakannya pelatihan tersebut	Tabalong	2024
--	--	----------	--	----------	------

6. Kecamatan Muara Uya ada 2 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Zainal Hadi	Peningkatan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Rehab pasar RT 03	Pasar batu RT 03, Kab. Tabalong	Akomodir 2024 untuk peningkatan halaman
2	Suriansyah	Penyediaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Perlunya pelatihan bagi PKK	Desa Simpung Layung, Kab. Tabalong	menggunakan dana desa

7. Kecamatan Muara Harus ada 1 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Tarmiji	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Belum ada sosialisasi pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil dll	DESA PADANGIN RT.05, Kab. Tabalong	Akomodir 2024

8. Kecamatan Murung Pudak ada 3 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Saipul Rahman ,S.Pd.	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Bantuan barang dagangan atau fasilitas usaha bagi umkm yang membutuhkan	DESA KAPAR, Kab. Tabalong	Non Prioritas
2	Khairullah	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kurangnya skill masyarakat dalam hal mengembangkan bakat dalam bidang desain kain batik	MASUKAU RT. 03, Kab. Tabalong	Akomodir 2024, menunggu proposal
3	Khairullah	Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kurangnya keahlian masyarakat dalam hal membuat usaha sampingan kecil-kecilan untuk menunjang perekonomian masyarakat(pelatihan kerajinan tangan	MASUKAU RT. 03, Kab. Tabalong	Akomodir 2025

			anyaman)		
--	--	--	----------	--	--

9. Kecamatan Upau ada 1 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Hariadi Nata	Pemeliharaan dan Perbaikan Bangunan Gedung	Rusaknya fasilitas gedung pasar dan sarana prasarana yang ada dipasar Desa Pangelak	Pasar Desa Pangelak RT 04, Kab. Tabalong	Akomodir 2024

10. Kecamatan Jaro ada 4 usulan :

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi	Keterangan
1	Pipi Iswanto	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Banyak Sisa Limbah Kayu, Maka perlu dimanfaatkan untuk pembuatan bahan Furniture	Desa Solan Kec. Jaro, Kab. Tabalong	Akomodir 2024, menunggu proposal
2	Sudik	Pengembangan Usaha Mikro/ Usaha Kecil	Belum bisa mengembangkan usaha secara maksimal (sosialisasi/pelatihan cara pengembangan usaha)	DESA NALUI, Kab. Tabalong	Pelatihan Kemasan, Akomodir 2024
3	Sudik	Penyelenggaraan Promosi dan Pemasaran Produk	Belum bisa melakukan promosi dan terkadang bingung dalam pemasaran produk (sosialisasi atau pelatihan cara promosi dan pemasaran)	DESA NALUI, Kab. Tabalong	Pelatihan Pemasaran Digital, Akomodir 2024
4	Jamin Effendi	Penyediaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan UMKM untuk meningkatkan sumber daya manusia guna meningkatkan perekonomian di masyarakat	Desa Lano,Rt.0 02 Kec.Jaro Kab.tabalong, Kab. Tabalong	Pelatihan Pengolahan Kopi (akomodir 2025)



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI

Sesuai dengan Visi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 -2045 adalah “BANUA BERBUDAYA, SEMUA SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, DAN MAJU (KALSEL BAABUSSALAAM)” yang dilaksanakan dengan 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
4. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban yang mendukung Stabilitas Daerah dan Negara
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
7. Mewujudkan Dukungan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
2. Pengembangan kehidupan sosial masyarakat yang semakin mapan dan harmonis disertai penguatan budaya local
3. Pengembangan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis hilirisasi industri dan pengembangan industri non ekstraktif, sebagai bagian dari superhub ekonomi Nusantara
4. Pengelolaan sumber daya alam potensial yang berkelanjutan dan terintegrasi antarwilayah kabupaten/kota
5. Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi
6. Peningkatan kelestarian lingkungan dengan prinsip pembangunan berketahanan dan berkelanjutan
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.
8. Pengembangan teknologi dan digitalisasi sebagai akselerator pembangunan di berbagai sektor.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 menyesuaikan dengan tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	
				Satuan	2024
1	Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi	Persentase koperasi aktif	Persen	59
			Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen	0,28
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Persen	11,33
		Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	9,21

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran Perubahan 2025 adalah sebanyak 15 program dan 25 kegiatan serta 41 Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.49.269.332.558,00,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) termasuk Gaji dengan dana APBD.

Berdasarkan pelaksanaan Rencana Kinerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung urusan Wajib dan Pilhan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.

Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kabupaten Tabalong dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Rumusan rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan maju Tahun 2026
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Bidang / Program / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN RENCANA MAJU (2026)	
			Lokasi	Target Kinerja	Dana	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
Bidang Koperasi									
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Kab. Tabalong	59%		APBD		-	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		63 Unit Usaha	84.630.700			63 koperasi	93.093.770
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI (Pemeriksaan Kesehatan)	Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi	Kab. Tabalong	16 Unit Usaha		APBD		16 Unit Usaha	

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		16 Unit Usaha	201.400.000			16 Unit Usaha	221.540.000
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Terwujudnya SDM Koperasi yang berkualitas	Kab. Tabalong	40%		APBD		40%	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		60 orang	172.718.400			60 orang	189.990.240
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil									
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasi Perizinan Usaha Mikro dan Fasilitasi Kemitraan Usaha	Kab. Tabalong	100%		APBD		100%	

	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		30 Unit Usaha	200.000.000			30 Unit Usaha	220.000.000
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terbinanya Para pelaku Usaha Mikro	Kab. Tabalong	100%		APBD		100%	
	Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi		200 Unit Usaha	500.000.000			200 Unit Usaha	550.000.000
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		300 Unit Usaha	850.000.000			300 Unit Usaha	935.000.000
Bidang Industri									
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kab. Tabalong	11,33%		APBD		11,57%	

	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	228.541.197			1 Dokumen	251.395.316
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	1.300.348.897			1 Dokumen	1.430.383.786
7	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	Kab. Tabalong	70%		APBD		70%	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik		1 Dokumen	29.363.400			1 Dokumen	32.299.739

	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah,	1 Dokumen	4.498.822			1 Dokumen	4.948.704
--	--	--	--------------	-----------	--	--	--------------	-----------

		selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat							
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri	Kab. Tabalong	100%		APBD		100%	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	29.168.700			1 Dokumen	32.085.570
Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian									
9	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentasi rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Kab. Tabalong	88%		APBD		88%	

	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik		4 Dokumen	28.600.000			4 Dokumen	31.460.000
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		4 Dokumen	22.000.000			4 Dokumen	24.200.000
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dokumen	24.200.000			1 Dokumen	26.620.000
10	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kab. Tabalong	9,21		APBD		9,21	

	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		4 Laporan	71.104.300			4 Laporan	79.464.730
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		4 Laporan	446.000.000			4 Laporan	474.600.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		2 Laporan	33.000.000			2 Laporan	36.300.000
11	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	Kab. Tabalong	60%		APBD		60%	

	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		50 Pelaku Usaha	113.203.970			50 Pelaku Usaha	124.524.367
12	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera / tera ulang	Kab. Tabalong	69%		APBD		69%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		1717 UTTP	391.000.000			1717 UTTP	430.100.000
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perdagangan									
13	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	Kab. Tabalong	85,15%		APBD		85,15%	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		5 Unit	19.061.108.217			5 Unit	20.967.219.038
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		1 Dokumen	1.153.030.254,			1 Dokumen	1.268.333.279
Sekretariat									

14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Layanan Kesekretariatan	Kab. Tabalong	B		APBD		B	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.		100%	217.979.695			100%	239.777.664
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 bulan	942.269.705			12 bulan	1.036.496.675
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas R4 dan R2		12 bulan	1.077.873.665			12 bulan	1.185.661.031
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		12 bulan	878.733.665			12 bulan	1.170.020.696

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.” (*Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*).

Untuk Tahun 2025 Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan dana sebesar Rp.49.269.332.558,00,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) termasuk Gaji dengan dana APBD. Rencana Kerja dan Pendanaan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG

Bidang Koperasi :

No	Program	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5	7	8	9
	2.17.03		2.17.03.2.01	2.17.03.2.01.0004			
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	84.630.700	43.551.000	-41.079.700
	2.17.04		2.17.04.2.01	2.17.04.2.01.0001			
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	119.467.000	73.450.263	-127.949.737
	2.17.05		2.17.05.2.01	2.17.05.2.01.0001			
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM KoperasiKabupaten/Kota	170.318.400	261.294.380	88.575.980

	2.17.06		2.17.06.2.01	2.17.06.2.01.0003			
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	0	7.000.000	7.000.000
				2.17.06.2.01.0004			
		Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya		Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	0	327.500.000	327.500.000
				2.17.06.2.01.0009			
		Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	0	3.800.000	3.800.000

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil :

No	Program	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5	7	8	9
	2.17.07		2.17.07.2.01	2.17.07.2.01.0002			
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	105.997.000	70.724.000	-129.276.000
				2.17.07.2.01.0003			
		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	120.319.000	118.673.550	-81.326.450
				2.17.07.2.01.0004			
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0	40.400.800	40.400.800
				2.17.07.2.01.0015			
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	0	307.651.179	307.651.179

	2.17.08		2.17.08.2.01	2.17.08.2.01.0002			
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Keci	Pengembangan Usaha Mikro	500.000.000	248.150.535	-251.849.465
				2.17.08.2.01.0006			
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	850.000.000	554.447.668	-295.552.332

Bidang Perdagangan dan Kemetrolagian :

No	Program	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5	7	8	9
	3.30.02		3.30.02.2.01	3.30.02.2.01.0001			
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	28.600.000	11.827.100	-16.772.900
			3.30.02.2.02	3.30.02.2.02.0001			
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	22.000.000	1.482.000	-20.518.000
			3.30.02.2.05	3.30.02.2.05.0001			
		Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	24.200.000	2.165.980	-22.034.020

		untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				
	3.30.04		3.30.04.2.01	3.30.04.2.01.0001			
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	62.500.000	20.254.000	-42.246.000
				3.30.04.2.01.0002			
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8.604.300	3.992.000	-4.612.300

Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar					
	3.30.04.2.02	3.30.04.2.02.0001			
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	125.000.000	28.688.000	-96.312.000
		3.30.04.2.02.0002			
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	61.000.000	10.188.000	-50.812.000

		Informasi Perdagangan					
				3.30.04.2.02.0003			
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	260.000.000	272.309.000	12.309.000
			3.30.04.2.03	3.30.04.2.03.0003			
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	33.000.000	11.908.388	-21.091.612
	3.30.05		3.30.05.2.01	3.30.05.2.01.0004			
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	113.203.970	84.522.728	-28.681.242

	3.30.06		3.30.06.2.01	3.30.06.2.01.0001			
4	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	330.000.000	204.161.694	-125.838.306
				3.30.06.2.01.0002			
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	61.000.000	32.294.685	-28.705.315

Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan :

No	Program	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5	7	8	9
	3.30.03		3.30.03.2.01	3.30.03.2.01.0001			
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	19.561.108.217	20.973.068.009	1.411.959.792
			3.30.03.2.02	3.30.03.2.02.0001			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.115.530.254	349.269.954	-766.260.300
				3.30.03.2.02.0002			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	37.500.000	11.741.440	-25.758.560

Bidang Industri :

No	Program	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5	7	8	9
	3.31.02		3.31.02.2.01	3.31.02.2.01.0004			
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	228.541.197	885.882.165	657.340.968
				3.31.02.2.01.0005			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.300.348.897	1.969.869.03	669.520.134
	3.31.03		3.31.03.2.01	3.31.03.2.01.0003			
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	4.498.822	4.498.822	0

		satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					
				3.31.03.2.01.0004			
		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	24.864.578	11.718.578	-13.146.000

		bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					
	3.31.04		3.31.04.2.01	3.31.04.2.01.0001			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	29.168.700	29.168.700	0

Sekretariat :

No	Program	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	2	3	4	5	7	8	9
	2.17.01		2.17.01.2.01	2.17.01.2.01.0006			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.816.932	33.040.384	-56.776.548
				2.17.01.2.01.0008			
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	41.514.763	16.729.466	-24.785.297
				2.17.01.2.01.0009			
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	86.648.000	43.279.769	-43.368.231
			2.17.01.2.02	2.17.01.2.02.0001			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.104.478.000	15.154.643.000	3.050.165.000
			2.17.01.2.06	2.17.01.2.06.0002			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.269.705	676.431.678	240.161.973

Renja_Diskopukmperindag 2025 Perubahan

yang Disediakan					
		2.17.01.2.06.0009			
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.000.000	684.752.000	178.752.000
	2.17.01.2.07	2.17.01.2.07.0001			
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	307.873.665	0	-307.873.665
		2.17.01.2.07.0009			
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	770.000.000	40.000.000	-730.000.000
	2.17.01.2.08	2.17.01.2.08.0001			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	308.809.340	61.231.312	-247.578.028
		2.17.01.2.08.0002			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.600.000	362.600.000	11.000.000
		2.17.01.2.08.0003			
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	101.796.065	102.961.431	1.165.366
		2.17.01.2.08.0004			
Jumlah Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan	764.935.200	3.982.980.000	3.218.044.800

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Umum Kantor			
			2.17.01.2.09	2.17.01.2.09.0001			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	675.320.000	675.320.000	0
				2.17.01.2.09.0009			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	203.413.665	464.709.869	261.296.204

BAB V

PENUTUP

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong melaksanakan beberapa kegiatan strategis diantaranya berupa Pembangunan Pasar Modern dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar lainnya, pelayanan tera/tera ulang, melakukan pelatihan untuk para IKM berbahan dasar lokal, memfasilitasi IKM dalam hal rekomendasi perijinan, rekomendasi ijin usaha perdagangan serta kegiatan pendukung lainnya. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong juga telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pelatihan bagi pengurus koperasi, pengawasan dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan pada seluruh koperasi di Kabupaten Tabalong, pembinaan UMKM, sosialisasi perizinan.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang semakin baik dalam tugasnya membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal ini urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan dan urusan perindustrian.